



Perda Perubahan Nama Lembaga Masih Digodok

YOGYA, TRIBUN - Peraturan Daerah yang mengatur perubahan nomenklatur kelembagaan di Kota Yogyakarta masih dalam pembahasan DPRD dan Pemkot

Yogyakarta.

Ditargetkan, Perda itu akan rampung pada bulan ini dan hanya akan mengatur tentang perubahan nomenklatur penyebutan ke-

lembagaan dari sejumlah instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta agar sesuai dengan Keistimewaan DIY.

● ke halaman 15

Perda Perubahan

● Sambungan Hal 9

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, M Fauzan menyebut, pada saat proses pembahasan lalu ada sejumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan pihaknya kepada Pemkot untuk dikaji ulang.

Ditambah lagi, pihaknya juga masih menunggu materi tambahan berupa muatan lokal dari Pemda DIY untuk dimasukkan dalam Perda itu.

"Masih proses pembahasan. Besok setelah pembukaan masa sidang, pembahasan akan kami lanjutkan kembali. Ada materi terkait Keistimewaan yang pandu-

annya masih disusun oleh Pemda DIY," kata Fauzan yang merupakan politisi PKS, Rabu (4/12).

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogya, Sarwanto menjelaskan, setelah pembahasan Perda rampung pihaknya juga akan menyampaikan materi Perda untuk dapat dievaluasi oleh Gubernur.

Adapun nomenklatur penyebutan kelembagaan yang mengalami perubahan di antaranya yakni Kecamatan menjadi Kemantren, Dinas Kebudayaan menjadi Kundha Kabudayan, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

Pada instansi Kemantren, "beberapa nama jabat-

an juga akan diubah penyebutannya. Camat akan diganti menjadi Mantri Pamong Praja, Sekretaris Kecamatan menjadi Mantri Anom, Seksi Pemerintah-an menjadi Jawatan Praja, Seksi Ketentraman menjadi Jawatan Keamanan, seksi Perekonomian menjadi Jawatan Kemakmuran, seksi Kesmas menjadi Jawatan Sosial, dan seksi Pelayanan Umum menjadi Jawatan Umum.

"Dari sisi tupoksi hampir sama semuanya. Namun ada beberapa tambahan seperti Jawatan Projo yang juga melakukan koordinasi pemantauan urusan Keistimewaan di bidang tata ruang dan itu sudah kita atur," jelas Sarwanto.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Yogya, Hari Setyowacno mengatakan, perubahan nomenklatur itu juga akan berpengaruh terhadap penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) di lingkup instansi tersebut.

Dia menyebut, pada tahun depan mekanisme anggaran Danais akan menjadi bantuan khusus keuangan (BKK).

"Nanti jelas ada beberapa pengguna anggaran yang tadi di tingkat provinsi akan ke kabupaten/kota," imbuhnya.

Namun demikian, tugas dan fungsi Dispetaru dikatakan dia masih tetap sama yakni berupa pelayanan inventaris tanah, sengketa, dan juga melakukan sertifikasi. (jof)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			
3. Dinas Kebudayaan			
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005